



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Juni 2025

Halaman: 2

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA YOGYAKARTA Pembangunan Kewilayahan, Komisi A Dukung Penguatan Linmas



YOGYA (KR) - Pembangunan kewilayahan menjadi salah satu tonggak daya ungkit kemajuan Kota Yogyakarta. Komisi A DPRD Kota Yogyakarta sebagai salah satu alat perlengkapan yang membidangi urusan kemantren hingga kelurahan pun memberikan dukungan upaya penguatan petugas perlindungan masyarakat (linmas).

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro, mengungkapkan peran dan tugas linmas selama ini mengindikasikan pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Sedangkan di tingkat kota diperkuat dengan Perda 7 tahun 2024 dengan nomenklatur yang sama. "Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, termasuk pe-



Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dalam memimpin rapat kerja.

ran dan tugas linmas dalam situasi darurat dan non-darurat," urainya.

Adanya regulasi yang secara khusus tersebut memberikan penekanan betapa pentingnya peran dan fungsi linmas dalam pembangunan kewilayahan. Terutama yang berada di tingkatan kelurahan dan kemantren. Secara kelembagaan, urusan linmas juga di bawah kendali Sat Pol PP Kota Yogyakarta. "Linmas berperan dalam membantu menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam kegiatan pemilihan umum. Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan

prasarana untuk mendukung kegiatan linmas," imbuhnya.

Kewenangan pemerintah daerah tersebut, jelas Susanto, yang bakal dikawal oleh jajarannya. Hal ini karena linmas selama ini terkesan kurang mendapatkan intervensi berkaitan pengembangan kapasitas. Kelurahan maupun kemantren bahkan belum bisa secara maksimal mengalkasikan kegiatan dan anggaran lantaran linmas berada di bawah Sat Pol PP.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Indurwanto Eko Cahyono, menambahkan saat ini tengah dilakukan revisi

perwal terkait pelimpahan kewenangan ke wilayah. Harapannya baik kelurahan maupun kemantren bisa terlibat secara langsung memberikan dukungan keberadaan linmas. Apalagi hampir setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh aparat di wilayah tidak lepas dari bantuan linmas. "Pada perubahan anggaran tahun ini Sat Pol PP mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas petugas linmas. Tentu itu akan kami dukung. Peningkatan kapasitas sebenarnya juga rutin dilakukan, tetapi selama ini hanya parsial di beberapa wilayah, belum bisa menyeluruh. Kalau setiap kelurahan atau kemantren diberi



Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan masukan dan saran dalam rapat kerja.

kewenangan, saya kira peran linmas akan semakin kuat," urainya.

Selain dari kapasitas, regenerasi juga perlu dipersiapkan. Pasalnya sebagian besar petugas linmas seolah diisi oleh para lansia. Kendati kapabilitas juga tidak diragukan, namun ide, gagasan dan tenaga dari para kaum muda sangat dibutuhkan oleh linmas. Oleh karena itu perlu ada gerakan agar anak-anak muda bisa ikut terlibat membersamai para orang tua dalam menjalankan tugas linmas. Komisi petugas linmas yang terdiri dari anak muda dan orang tua mampu menjadi daya ungkit baru dalam

menggerakkan wilayah. "Jangan sampai petugas linmas hanya identik dengan membantu ketika ada hajatan nikah atau layatan. Tetapi bagaimana ketertarikan umum dan ketenteraman masyarakat juga benar-benar menjadi bagian dari fungsi linmas. Jangan anggap remeh peran linmas," tandasnya.

Hal yang tidak kalah penting dalam peningkatan maupun penguatan kapasitas linmas ialah menyangkut kesejahteraan. Meski belum ada gaji secara khusus namun linmas berhak atas honorarium ketika ada kegiatan. Merujuk standar harga barang dan jasa, honor yang diterima ialah Rp

80.000 per kegiatan dipotong pajak. Sudah selangkahnya aturan mengenai standar harga barang dan jasa tersebut dirasionalisasi. Di samping itu, petugas linmas yang menjalani piket di kelurahan maupun kemantren juga sudah diatur hak dan kewajibannya.

Indurwanto mengungkapkan, petugas linmas bahkan bisa turut didaftarkan kepesertaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini karena untuk mendapatkan jaminan tersebut tidak semata didasarkan pada SK sebagai pegawai tetap melainkan juga cukup surat tugas. Pasalnya, petugas linmas di wilayah rata-rata dibentuk melalui surat keputusan atau penunjukan dari lurah maupun mantri pamong praja. "Kemampuan anggaran saya kira tidak masalah. Iur bagi yang menggunakan surat tugas ialah Rp 16.000 per bulan. Itu sangat terjangkau dengan manfaat jaminan yang dapat diterima jika mengalami risiko pekerjaan. Jadi sangat bisa diakomodir oleh pemerintah daerah," terangnya.

Selain itu pemberian penghargaan bagi petugas linmas juga layak diberikan. Terutama sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian yang telah diberikan serta jasanya atas pembangunan di wilayah. (Dhi)



Jajaran kelurahan mengikuti rapat kerja di Komisi A.



Jajaran kemantren mengikuti rapat kerja di Komisi A.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005